

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH

(Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara)

TESIS



Oleh

T. REZA ZULKARNAEN

NPM. 051801068

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2007

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH

(Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara)

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

T. REZA ZULKARNAEN

NPM. 051801068

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2007

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara)

N a m a : Jumali

N I M : 051801068

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Heri Kusmanto, MA


Drs. Safrin, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur


Drs. Kariono, MA


Drs. Heri Kusmanto, MA



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan sekaligus penulisan tesis ini dengan judul “ *Implementasi Kebijakan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara)*.”

Penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari berbagai pihak yang ikut andil sejak penulis memulai perkuliahan pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area di Medan, untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M Yakub Matondang sebagai Rektor Universitas Medan Area dan seluruh pengelola Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
2. Drs. Heri Kusmanto, MA yang dalam kesibukannya tetap meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang cukup berarti hingga tesis ini terselesaikan.
3. Drs. Safrin, MA yang telah mengarahkan dan membimbing serta memberikan masukan yang cukup berharga pada penulisan tesis ini.
4. Drs. Kariono, MA yang telah menjadi motivator penulis sejak awal perkuliahan dan membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Ir. Farhan I Tanjung, Mstr selaku pimpinan pada instansi penulis yang telah memberikan dukungan moril bagi penulis mengikuti perkuliahan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
6. Istri dan anak-anakku tercinta yang terus menerus memberikan dorongan sehingga menimbulkan motivasi bagi penulis menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi perbaikan kebijakan publik dan aparatur pelaksana kebijakan publik. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan oleh karenanya penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun demi perbaikannya.

Medan, 6 Januari 2007
P e n u l i s

T. REZA ZULKARNAEN

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II : KERANGKA TEORITIS	16
A. Kebijakan Publik	16
B. Tujuan Kebijakan Publik	25
C. Implementasi Kebijakan Publik	28
D. Good Governance dalam Kebijakan Publik	36
E. Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih	42
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Populasi dan Sampel	50
C. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Wawancara	54
2. Kuesioner	54

3. Pengamatan (<i>Observasi</i>)	55
4. Studi Dokumentasi	55
D. Teknis Analisis Data	56
BAB IV : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	58
A. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	58
B. Organisasi dan Tata Kerja UPPKB Dinas Perhubungan Provsu ..	62
C. Sarana dan Prasarana UPPKB Dinas Perhubungan Provsu	70
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Prosedur Penimbangan Angkutan Barang	74
B. Variabel Penelitian	76
C. Hambatan-Hambatan	95
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistim transportasi nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 1997 menyebutkan bahwa transportasi memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Transportasi ataupun perangkutan di Indonesia menghadapi tantangan baik dalam skala nasional, regional maupun global. Dampak dari pergolakan ekonomi global yang semakin lama semakin deras yang diwarnai oleh liberalisasi perdagangan dan kesepakatan perdagangan regional seperti AFTA, APEC, WTO serta makin canggihnya teknologi informasi dan telekomunikasi, menuntut kerja keras pemerintah dalam membangun sistim perangkutan yang memiliki keandalan, efisiensi dan daya saing yang tinggi.

Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa transportasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien serta memadukan transportasi lainnya dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional dan menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan,

pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional. Lalu lintas dan angkutan memiliki arti dan permasalahan yang berbeda namun tetap merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling mendukung. Lalu lintas (Traffic) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang atau hewan di jalan, sedangkan angkutan (transport) adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Pengertian barang dan orang dalam kaitan dengan moda angkutan disebut muatan dan dalam konteks penulisan ini, muatan yang dimaksud adalah muatan barang. Sedangkan “ muatan lebih ” berarti barang yang diangkut melebihi kapasitas daya angkut kendaraan. Kendaraan atau moda angkutan menurut ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 tahun 1992 memiliki pengertian sebagai suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri atas kendaraan bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan kendaraan tidak bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.

Undang-Undang tersebut juga menentukan persyaratan pengoperasian kendaraan di jalan yakni :

1. Harus sesuai dengan peruntukannya yaitu sesuai dengan rancangan peruntukannya agar orang atau barang yang diangkut terjamin keselamatan dan keamanannya sampai ditempat tujuan dalam kondisi yang diinginkan.
2. Harus memenuhi persyaratan teknis yakni memenuhi persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, Iskandar , 1999, Rekayasa Lalu Lintas, Direktorat Bina Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Kota, Ditjendat , Departemen Perhubungan.
- Abu Bakar, Iskandar, 2004, Penataan dan Pengelolaan Jembatan Timbang, Departemen Perhubungan.
- Agustino, Leo, 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
- Albab, Ulul, 2006, Materi kuliah kebijakan publik, Universitas Bung Tomo, Surabaya.
- Anwar Pabu Mangkunegara, A.A., 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
- A.R Mustopadidjaja, 2003, Makalah, Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R I.
- Ashari, Edi Topo dan Fernanda, Desi, 2001, Membangun Pemerintahan yang baik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, Penegakan Hukum, www.solusi.hukum.com, Artikel 49.
- Abdul Wahab, Solihin, 1990, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Rineke Cipta, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solihin, 2001, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2006, Sumut Dalam Angka Tahun 2006, BPS
Sumut.
- Bardach, Eugene, 1991, The Implementation Game, Cambridge, Massachusette, MIT
Press.
- David, Stewart & David, 1980, The Theory and Practice of Transport, Heinemann,
London.
- Dunn, N, William , 1998, Analisis Kebijakan Publik, Gadjah mada University Press,
Yogyakarta.
- Juwana, Hikmahanto, 2006, Penegakan hukum dalam kajian Law and
Development, www.ui .edu, berita.
- Kumorotomo, Wahyudi, 1999, Etika Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
- Keban, Yermias T, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Gava Media,
Yogyakarta.
- LAN-BPKP, 2000, Akuntabilitas dan good governance, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Rencana Strategis 2000-2004.
Jakarta.
- Lester, James P and Stewart, Joseph, 2000, Public Policy : An Evolutionary Approach
Wadsworth (second edition), Australia.
- Naihasy, Syahrin, 2006, Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Madani, Mida
Pustaka, Jogjakarta.

- Nawawi, Hadari H, 1998, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Riduan, 2003, Dasar-dasar Statistika, Alfabeta, Bandung.
- Siagian, Sondang P, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, 1995, Metode Penelitian Survei, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta
- Siregar, Muchtaruddin, 1990, Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan, LPFE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi, 2006, Modal Sosial dalam Pembangunan, Makalah pada Semiloka Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarmasin 21 Maret 2006.
- Sutopo dan Sugiyanto, 2001, Analisis Kebijakan Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Adidjojo, Mustopa A.R, 1998, Kebijakan Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- UNDP, 1997, Governance For Sustainable Development- A Policy Document, New York : UNDP.
- Umar, Genius, 2002, Makalah Kebijakan Transportasi, IPB Bogor.
- Utomo, Warsito, 2003, Dinamika administrasi publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wibawa, Samodra, 2005, Reformasi Administrasi, Gava Media, Yogyakarta

Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Med Press, Yogyakarta.

Warpani, Soewardjoko, 2002, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan jalan, ITB
Bandung.

Zulfajri, Em dan Senja , Ratu Aprilia, (tanpa tahun),Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,
Difa Publisher.